

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kuasa Pertambangan Berkaitan Dengan Praktik Tumpang Tindih Izin Lahan Pertambangan (Studi terhadap Tumpang Tindih Lahan antara CV. Megah Surya Jaya dengan CV. Alam Sumber Rejeki, CV. Rizki Maulia Bara, CV. Bumi Sakti Prakara Mandiri, CV. Sarana Usaha, dan CV. Sumber Alam Inti Mandiri)

Ketidakadanya kepastian diterima atau ditolaknya Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dari Eksplorasi menjadi Eksploitasi oleh Bupati Tanah Bumbu memberikan kerugian bagi pihak CV (SMJ).

Dari uraian tersebut maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut : 1. Mengapa terjadi praktik tumpang tindih izin lahan terhadap hak pemegang Kuasa Pertambangan (CV. MSJ) di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan? dan 2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pemegang Kuasa Pertambangan (CV. MSJ) terhadap kebijakan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan?.

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Yuridis – Normatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif – analitis dengan sumber data secara primer yaitu : peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui : buku-buku, makalah, majalah, koran, desertasi, tesis dan pendapat ahli hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu : 1. Dikeluarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu pada tahun 2008 terhadap 5 KP Eksplorasi diatas lahan CV (SMJ) yang mana pada saat itu sedang diajukan permohonan KP Eksploitasi. Pengajuan permohonan CV (SMJ) terjadi sejak tahun 2004 – 2008. 2. Atas Perbuatan Bupati Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dilakukan upaya hukum dimana upaya ini harus disesuaikan kedalam peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Resort Tanah Bumbu.

Dari uraian diatas maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu terhadap 5 KP Eksplorasi diatas lahan CV (SMJ) tersebut diduga kuat merupakan penyalahgunaan wewenang sedangkan 2. Upaya perlindungan hukum CV (SMJ) dalam persoalan ini telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009, serta PP Nomor 23 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba telah berganti menjadi PP Nomor 77 tahun 2014, UU nomor 32 tahun 2004 yang sebelumnya mengatur mengenai Pemerintahan Daerah telah diterbitkan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kalimantan selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang pertambangan Umum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kuasa Pertambangan, Tumpang Tindih

ABSTRACT

**Legal Protection for Mining Rights Holder Relating to Practice Permit
Overlapping of Land Mines
(Studies of Overlapping land between the CV. Surya Megah Jaya CV.
Natural Resources fortune, CV. Rizki Maulia Bara, CV. Prakara Bumi Sakti
Mandiri, CV. Means Business, and CV. Sumber Alam Inti Mandiri)**

Unsuretable certainty of acceptance or rejection of the Mining Authorization Request Extension of Exploration into exploitation by Tanah Bumbu disadvantages CV (SMJ).

From the description, the authors take the problem as follows: 1. Why the practice of overlapping land permission of the rights holder of Mining Authority (CV. MSJ) in Tanah Bumbu regency, South Kalimantan? and 2. How legal safeguards that can be given to holders of Mining Authority (CV. MSJ) on policy Tanah Bumbu South Kalimantan ?.

This thesis uses juridical approach - Normative were then analyzed by descriptive - analytical data of primary sources: legislation, while the secondary data obtained through: books, papers, magazines, newspapers, dissertations, theses and expert opinion law.

The results obtained in this paper are: 1. Issued Tanah Bumbu decision in 2008 to 5 KP Exploration on land CV (SMJ) which at the time the petition was filed KP Exploitation. The submission of CV (SMJ) occurred from 2004 - 2008. 2. On the Actions Tanah Bumbu South Kalimantan efforts made law where these efforts should be keyed into the legislation new: Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining by reporting the incident to the Police Resort Land Bamboo.

From the description above, the conclusion that can be drawn is: 1. Decision Tanah Bumbu to 5 KP Exploration on land CV (SMJ) is allegedly an abuse of authority while 2. Efforts legal protection CV (SMJ) in this issue has to adjust to the laws The new -undangan namely Law No. 4 of 2009, as well as Regulation No. 23 Year 2010 regarding the implementation of mining business activities Mining has been changed to Government Regulation No. 77 of 2014, Law No. 32 of 2004 which previously set the Regional Government has issued new regulations that Act -Undang Number 23 Year 2014 and regulated in south Kalimantan Local Government Regulation No. 2 of 2009 on the General.

Keywords: Legal Protection, Mining Authority, Overlapping